**STRATEGI MITIGASI BENCANA BANJIR PADA WILAYAH DAERAH**

**ALIRAN SUNGAI WANGGU DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Widyastuti

NPP. 30.1378

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: widyastuti2901@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Sri Heryati, SH, M. Si

# *ABSTRACT*

***Problem Statement/Background (GAP):*** *The background of this research is that floods occur almost every year, the biggest of which occurred in 2013 which resulted in damage to facilities and infrastructure, public facilities, gardens, rice fields and residential areas, especially in the area around the channel and estuary of the Wanggu River.* ***Purpose:*** *he purpose of this study was to identify and analyze the Kendari City BPBD strategy in mitigating floods.* ***Method:****This study used a qualitative descriptive method with an inductive approach. In addition, the author's data sources are person (person), place (place), and paper (document) with data collection techniques used interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of Strategy Analysis according to Kooten.* ***Result:*** *Based on the results of the analysis, it can be concluded that the strategy of the Kendari City Regional Disaster Management Agency in mitigating floods has been well implemented in several indicators. However, there is still a crucial deficiency, namely the institution of the Kendari City BPBD makes disaster programs unable to be implemented smoothly. This is also because the Kendari City Government pays little attention to disaster agencies because they feel that disasters with large impacts rarely occur in Kendari City.* ***Conclusion:*** *The strategy of the Flood Disaster Mitigation Agency in Kendari City has not been fully maximized. BPBD has carried out socialization and counseling to the community but has not been maximally implemented by the community, so that the emergence of community independence in dealing with flood disasters.*

***Keywords: Strategy, Flood Disaster, Mitigation***

# ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banjir yang terjadi hampir setiap tahun, yang terbesar terjadi pada tahun 2013 telah mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, kebun, sawah dan daerah permukiman terutama pada daerah disekitar alur dan muara Sunggai Wanggu. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis strategi BPBD Kota Kendari dalam mitigasi bencana banjir. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu, sumber data penulis adalah *person* (orang), *place* (tempat), dan *paper* (dokumen) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Analisis Strategi menurut Kooten. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan tentang strategi Badan Penanggulagan Bencana Daerah Kota Kendari dalam mitigasi bencana banjir bahwa dalam beberapa indikator telah terlaksana denga baik. Namun, masih terdapat kekurangan yang krusial yaitu kelembagaan dari BPBD Kota Kendari membuat program – program kebencanaan kurang bisa dilaksanakan dengan lancar hal ini juga dikarenakan Pemerintah Kota Kendari kurang memperhatikan instansi kebencanaan karena merasa bencana yang dampaknya besar jarang terjadi di Kota Kendari. **Kesimpulan:** Strategi Badan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Kendari belum sepenuhnya maksimal. BPBD telah melakukan sesosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tetapi belum maksimal diterapkan oleh masyarakat,sehingga tidak munculnya kemandirian masyarakat dalam menangani bencana banjir.

**Kata kunci:** **Strategi, Bencana Banjir, Mitigasi.**

# PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Terkait hal tersebut pemerintah membentuk badan untuk menanggulangi bencana yaitu: BNPB (tingkat nasional) senada dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD (tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota) senada dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Dengan dibentuknya badan ini tentu saja diharapkan mampu menjadi penyelenggara penanggulangan bencana di tingkat pusat maupun daerah.

Kota Kendari secara astronomis terletak di bagian selatan garis khalustiwa terletak di antara 3˚54`40˝ - 4˚5`55˝ LS dan 122˚26`33˝ - 122˚39`14˝ BT. Kota dengan luas 301,00 km² (30.100 Ha) dan penduduk sejumlah 343.202 (data sensus penduduk 2020) ini merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota kendari sering menjadi daerah langganan banjir ketika musim penghujan telah tiba, berdasarkan data dari Badan Statitistik Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2020 banjir selalu terjadi di Kota Kendari. Kecamatan yang menjadi langganan banjir di Kota Kendari yaitu, Kecamatan Kadia, Baruga, Kambu, Poasia, Abeli, Kendari Barat, Mandonga, Puwatu dan Wua wua.

Kota Kendari merupakan wilayah rawan bencana alam, pada tahun 2013 Kota Kendari dilanda banjir yang menyebabkan ribuan orang terdampak banjir. Daftar kecamatan dengan risiko tinggi terhadap banjir di Sulawesi tenggara tahun 2016 yakni kecamatan Abeli, Puuwatu, Kambu, Baruga serta Poasia (BPBD Kota Kendari, 2017). Mitigasi ialah bagian pra bencana, yang berperan meminimalisir risiko bencana. Sehingga pemahaman tentang mitigasi bencana mesti dipahami oleh seluruh kalangan

Untuk mengatasi kebencanaan di Kota Kendari maka Pemerintah daerah Kota Kendari membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Pembentukan Organiasasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Terbentuknya BPBD diharapkan mampu mengurangi dampak dari bencana terutama ketika tanggap darurat bencana. Dalam UU No. 24 tahun 2007 pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana wajib mendapat bantuan terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk itu BPBD sebagai wakil dari pemerintah daerah harus melaksanakan hal tersebut.

# Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyebab banjir di Kota Kendari salah satunya karena dilalui oleh sungai wanggu dan sungai sampara yang termasuk sungai besar di Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari merupakan daerah muara kedua sungai tersebut sehingga ketika musim penghujan tiba luapan air dari kedua sungai besar tersebut dengan debit air yang cukup besar sehingga hal tersebut akan menyebabkan air meluap ke area pemukiman warga yang mengakibatkan banjir terjadi. Letak topografi yang termasuk dataran rendah dan pembangunan drainase yang tidak berpola dengan baik juga merupakan penyebab banjir yang terjadi. Banjir yang tejadi di Kota Kendari selalu datang ketika musim penghujan tiba, yang terparah terjadi pada tahun 2013. Bulan juli 2013 tepatnya dipertengahan bulan ramadhan banjir terjadi di Kota Kendari, banjir setinggi leher orang dewasa ini mengakibatkan banyak warga harus mengungsi dikarenakan rumah mereka terdampak banjir selain itu terjadi juga kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum.

Di kota Kendari pada tahun 2017 terdapat korban banjir yakni 14.859 jiwa serta 3.383 KK serta 1 orang meninggal dunia, pada tahun 2018, di Kelurahan Lepo-Lepo ada 232 KK serta 983 jiwa yang terdampak banjir serta 211 rumah terendam. Serta tahun 2019 di kelurahan Lepo-Lepo terdapat 160 KK serta 647 jiwa yang terdampak banjir (BPBD Kota Kendari, 2017).

**Tabel 1. 1**

**Kejadian Banjir di Kota Kendari dari Tahun 2017-2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Korban Banjir Kota Kendari 2017-2021** |
| **Rumah Terendam** | **Jumlah Jiwa Menderita** | **Tahun** |
| 1 | 504 | 12173 | 2017 |
| 2 | 1093 | 4648 | 2018 |
| 3 | 225 | 947 | 2019 |
| 4 | - | - | 2020 |
| 5 | - | 491 | 2021 |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari*

Tabel diatas menunjukan bahwa dari tahun 2017 di Kota Kendari korban bencana banjir yakni 12.173 jiwa yang menderita serta rumah yang terendam sebanyak 504 rumah. Kemudian pada tahun 2021 yang lalu terjadi bencana banjir dengan korban jiwa yang menderita sebanyak 491 jiwa (BNPB, 2021).

# Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Heri Dwiputra yang berjudul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”, menjelaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli, BPBD berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan hingga peraturan bupati Tolitoli serta telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun strategi BPBD Kabupaten Tolitoli telah terlaksana dan terealisasikan walaupun ada kendala yang sering menghambat.

Penelitian dari Rezky Nazarina Olii yang berjudul ”Strategi Mitigasi Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kota GorontaIo” menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap mitigasi banjir di Kota Gorontalo masih jauh dari harapan responden, serta pandangan tesebut dinilai tahap pra bencana, tahapan terjadinya bencana serta pasca bencana.

Penelitian dari Ayu Sekar Ningrum yang berjudul “Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Seulalah
Kota Langsa” menjelaskan bahwa Strategi penanganan banjir dengan mitigasi bencana di kawasan rawan banjir di Kota Langsa terbagi menjadi dua, yakni: (1) Mitigasi struktural berupa penjelasan tentang pembuatan bangunan pengendali banjir ; (2) Mitigasi non struktural berupa pelatihan mitigasi bencana, serta evaluasi kebijakan pengurangan risiko banjir pada kawasan rawan banjir di Kota Langsa, Aceh, Indonesia.

# Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan utamanya, yaitu dimana permasalahan utama penelitian ini yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari belum memiliki sistem peringatan dini, sehingga kesulitan untuk memperingatkan masyarakat akan terjadinya banjir. BPBD telah melakukan sesosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tetapi belum maksimal diterapkan oleh masyarakat,sehingga tidak munculnya kemandirian masyarakat dalam menangani bencana banjir.

# Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan strategi mitigasi bencana banjir pada wilayah daerah aliran sungai wanggu di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, faktor penghambat serta strategi yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam meningkatkan kelas ketahanan, kesiapsiagaan, dan kekuatan daerah untuk menghadapi bencana banjir pada Wilayah Daerah Aliran Sunggai Wanggu di Kota Kendari.

# METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya”.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang impelementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Strategi menurut Kooten dalam Salusu (2006: 104) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya dan strategi kelembagaan.

#  HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Strategi Mitigasi Bencana Banjir Pada Wilayah Daerah Aliran Sungai Wanggu Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

 Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan konsep Kooten dalam menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat diketahui strategi apa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 4 (empat) jenis strategi yaitu :

#### 3.1.1 Strategi Organisasi

Strategi Organisasi ialah strategi dalam menjalankan misi guna mencapai visi yang ditentukan didalam organisasi yang merupakan bagiannya, biasanya strategi ini disebut sebagai *Grand Strategy* karena akan mendasari tiap – tiap kegiatan yang dilakukan organisasi dan apabila salah dalam pelaksanaanya akan berakibat fatal. Secara keorganisasiaan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari ditinjau dari segi visi dan misi dalam hal pengurangan risiko bencana banjir BPBD memiliki visi yaitu melakukan pencegahan bencana banjir dengan meninjau dan membangun mitigasi secara struktural dan non struktural dengan misi yaitu melakukan peninjauan kembali bangunan mitigasi bencana banjir dan pembangunan masyarakat tangguh bencana, yang nantinya akan memberikan nilai dalam pengurangan risiko bencana banjir.

Pencegahan terjadinya bencana banjir merupakan strategi organisasi yang diutamakan atau sebagai *Grand Strategy* dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kota Kendari. Dikarenakan strategi organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari fokusnya adalah pencegahan bencana banjir. Sebagai organisasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari memiliki strategi dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Prinsip dari *Smart Governance* merupakan tolak ukur bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam pelayanan. Sebagai lembaga yang menjamin terlaksananya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh dalam rangka pengurangan risiko bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam pengurangan risiko bencana banjir terlebih dahulu membuat perencanaan lalu berkoordinasi dan membangun komunikasi kepada masyarakat agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari akan menjamin pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

strategi organisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari sudah sangat tepat yaitu dengan memfokuskan dengan pencegahan bencana banjir yang akan terjadi sebagai *grand strategy* dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, namun dalam pelaksanaan pencegahan ini pastinya harus memerlukan waktu dan anggaran yang sangat banyak. Oleh karena itu keterlibatan SKPD yang lain juga sangat diperlukan dan harus meningkatkan jaringan komunikasi agar pelaksanaan pencegahan dapat dianggap sebagai masalah umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintahn Kota Kendari.

#### 3.1.2 Strategi Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam hal pengurangan risiko bencana banjir menyusun program–programyang akan mengurangi risiko bencana banjir di Kota Kendari sebagai tujuan utama permasalahan yang ada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari mempunyai program pegurangan risiko bencana banjir yaitu dengan membuat titik evakuasi di kelurahan – kelurahan Kota Kendari guna mempermudah masyarakat Kota Kendari dalam melakukan evakuasi agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu berbuat apa jika terjadi bencana banjir karena titik evakuasi memang tidak pernah dibuat. Program kedua yaitu pembaharuan mitigasi bencana yaitu berupa pembaharuan infrastruktur kebencanaan seperti penyusuran dan pembaharuan saluran drainase yang ada di Kota Kendari. Program ketiga yaitu melakukan pengembangan Tim Reaksi Cepat guna membentukan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari agar bisa meminimalisir risiko dan menguranginya jika terjadi bencana banjir di Kota Kendari. Program keempat yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari melaksanakan sosialisasi mengenai Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) guna membentuk mitigasi secara non struktural pada masyarakat Kota Kendari yaitu paradigma masyarakat Kota Kendari yang tangguh akan bencana.

Masyarakat merasakan dampak positif dari program pembuatan titik evakuasi sebab hal itu membuat masyarakat tahu akan apa yang akan dilakukan jika terjadi bencana banjir khususnya untuk berkumpul di titik evakuasi agar risiko yang akan didapat dari bencana banjir bisa berkurang dan tidak menimbulkan kerugian jiwa yang signifikan dan bisa mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan evakuasi ketempat yang lebih aman. Program pembaharuan mitigasi yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak lepas dari konsep pentahelix dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi untuk membangun kesadaran secara kolektif khususnya dalam penanggulangan bencana agar Kota Kendari bisa membangun mitigasi bencana banjir supaya meningkatkan kualitas pengurangan risikobencana banjir, pembaharuan mitigasi ini dilakukan secara berkerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari sangat ingin membentuk paradigma masyarakat Kota Kendari yang tangguh akan bencana karena masyarakat merupakan tokoh utama dalam menghadapi bencana tersebut dengan masyarakat yang tahu akan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana maka risiko dari bencana tersebut akan otomatis berkurang drastis. Disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari juga menganggap sosialiasi ini sangat penting untuk masyarakat sehingga terjadi penaikan angka sosialiasi dua kali lipat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Program merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggapai sasaran dan tujuan juga mendapakan kegiatan oleh masyarakat yang dikoordinasikan dengan organisasi masyarakat atau alokasi anggaran. Dalam hal pelaksanaan sebuah program akan berhasil, kurang berhasil, bahkan gagal sama sekali apabila dilihat dari *outcomes*. Program terkait pengurangan resiko bencana banjir telah dilaksanakan. Program itu diharapkan dapat mengurangi bencana banjir di Kota Kendari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berharap supaya masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam melakukan program terkait pengurangan risko bencana banjir.

**3.1.3 Strategi Sumber Daya**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait pengurangan resiko bencana banjir melakukan kerja sama kepada Damkar sebagai bentuk pelaksanaan sosialiasi kepada masyarakat, Badan Penanggulanngnan Bencana Daerah juga melaksanakan pelatihan kepada tim TRC (Tim Reaksi Cepat) dengan mengundang Damkar sebagai pemberi materi penanggulangan bencana banjir, pembagian tanggung jawab pada saat terjadi banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari melakukan bantuan sosial sedangkan Damkar dengan TRC (Tim Reaksi Cepat) melakukan penanganan di lapangan untuk mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari merupakan kewajiban oleh pemerintah. Sehingga salah satu strategi guna mengurangi risiko bencana banjir dengan meningkatkan kapasitas aparatur tersebut. Strategi sumber daya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam mengurangi risiko bencana banjir adalah dengan memperkuat barisan relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari juga mengembangkan TRC (Tim Reaksi Cepat) agar penanganan jika terjadi bencana banjir bisa dilakukan dengan cepat dan mencakup wilayah penanganan yang luas agar meningkatkan pengurangan risiko bencana banjir tersebut.

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi dalam menunjang sebuah organisasi dalam melakukan program – program khusus nya membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam melakukan penanganan bencana banjir karena dengan adanya sarana dan prasarana akan memudah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam menjalakan program guna mencapai tujuan pengurangan risiko bencana banjir, pada intinya sarana dan prasarana mempermudah aktivitas pekerjaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya merupakan landasan dari organisasi untuk berjalan dengan baik. Sumber daya baik manusia, alam, teknologi, modal dan lain - lain walau ada yang mendominasi diantara sumber daya yang lain tetap saja proses manajemen yang akan menentukan efketif dan efesien sebuah organisasi atau institusi memnafaatkan sumber daya yang dimiliki.

**3.1.4 Strategi Kelembagaan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam melakukan pengurangan risiko bencana banjir memiliki strategi kelembagaan dalam menanggapi bencana banjir tersebut yaitu dengan melakukan inisiatif terbaru, koordinasi antar lembaga, dan menjaga kelestarian ekologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari memikili strategi kelembagaan tersendiri dalam melakukan pengurangan risiko bencana banjir yaitu dengan melakukan inisiatif strategi sesuai dengan lingkungan yang ada di Kota Kendari, koordinasi antar lembaga lintas kabupaten dan kota, dan melakukan pengurangan risiko bencana banjir dengan melestarikan ekologi yang ada.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari mengambil langkah strategi kelembagaan dengan menggunakan kondisi lingkungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari menggunakan hutan kota sebagai upaya penyerapan air dari bencana banjir tersebut dengan melakukan penanaman dan penambahan di hutan kota yang ada di Kota Kendari. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari adalah melakukan kerja sama antar daerah agar bisa melakukan pengurangan risiko bencana banjir ini secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Tenggara oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari melakukan koordinasi lintas kabupaten kota untuk mengurangi risiko bencana banjir. Dalam melakukan pengurangan risiko bencana banjir di Kota Kendari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari memilih strategi dalam pelaksanaanya agar pengurangan risiko bencana banjir bisa dilakukan tanpa menggangu kelestarian ekologi dan menambah kelestarian ekologi di Kota Kendari.

# 3.2 **Faktor pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari Dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir Di Kota Kendari**

**3.2.1 Penerapan Sumur Resapan dan Biopori**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari berupaya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya resapan dan biopori, serta bagaimana cara merancang dan membangunnya dengan benar. Kemudian berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari melakukan sosialisasi penanganan potensi kebencanaan, yang dihadiri unsur kepolisian, satuan kerja perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan serta masyarakat. Dalam penerapan sumur resapan dan biopori ini BPBD melakukan penyuluhan mengenai pentingnya resapan dan biopori kemudian BPBD juga bekerjasama dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap sumur resapan dan biopori sehingga strategi yang dilakukan ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan BPBD dalam pra bencana banjir di Kota Kendari.

#### 3.2.2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air

Pemerintah maupun komunitas di Kota kendari belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait perlindungan daerah tangkapan air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kendari perlu menyusun kebijakan perlindungan daerah tangkapan air. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir sebagai upaya peningkatan efektivitas. Untuk mengatasi hal tersebebut BPBD melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta melakukan rehabilitasi lahan. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) guna mewujudkan ketahanan dalam mitigasi potensi bencana di daerah tersebut.

Pembentukan FPRB tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 945 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus FPRB Kota Kendari Periode Tahun 2018-2021 karena telah berakhir. Ia menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas terlaksananya kongres pertama tersebut, yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendari dalam rangka pembentukan FPRB. Dalam konteks penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Kendari memiliki mandat untuk melindungi warganya dari kemungkinan bencana Kemudian BPBD melakukan peningkatan sistem pengelolaan air yang efisien serta mengatur penggunaan air secara bijak dan melakukan pengendalian sungai serta memantau cuaca di daerah tangkapan air.

Dalam mengatasi masalah perlindungan daerah tangkapan air ini BPBD memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut dan BPBD juga bekerja sama dengan stakeholder yaitu PDAM dan BMKG guna menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kesiapsiagaan pra bencana banjir di Kota Kendari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari mengingatkan kepada masyarakat terkait beberapa tempat yang menjadi titik rawan terjadinya bencana.

**3.2.3 Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai**

Pemerintah maupun komunitas di Kota kendari belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di BPBD Kota Kendari, menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut BPBD Kota Kendari melakukan Evaluasi kondisi sungai, melakukan kegiatan penanaman vegetasi, peningkatan kapasitas saluran. Rehabilitasi riparian zone, membangun bendungan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui upaya-upaya restorasi sungai yang dilakukan oleh BPBD, diharapkan kondisi sungai dapat diperbaiki dan risiko banjir dapat diminamalkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan sungai sebagai aset alam yang penting bagi keberlangsungan hidup.

# 3.3 Faktor Penghambat **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari Dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir Di Kota Kendari**

#### 3.3.1 Belum Adanya Kebijakan Mengenai Penerpan Sumur Resapan

Dalam mengurangi luapan air yang dapat menyebabkan terjadinya banjir diperlukan daerah resapan yang baik, penulis melakukan pengamatan terhadap daerah yang rawan terjadi bencana banjir di kota Kendari. Masih banyak daerah yang belum memiliki biofori dan banyak daerah resapan yang tertutup tanah ataupun sampah sehingga menjadi tersumbat dan menyebabkan banjir. Akibat kurangnya daerah resapan menghambat air mengalir dan proses kesiapsiagaan pra bencana banjir belum maksimal. Dalam Evaluasi dan pengendalian terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Kendari telah dituliskan dalam Laporan Akhir Potensi dan Kajian Risiko Bencana Kendari Tahun 2019 dalam evaluasi ini. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori .Pemerintah maupun komunitas di Kota kendari belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup berupa penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk bencana banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota kendari perlu menyusun kebijakan penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk bencana banjir. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.

Kemudian dalam Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air. Pemerintah maupun komunitas di Kota kendari belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait perlindungan daerah tangkapan air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota kendari perlu menyusun kebijakan perlindungan daerah tangkapan air. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir sebagai upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai Pemerintah maupun komunitas di Kota kendari belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti restorasi sungai sebagai upaya upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota kendari perlu menyusun kebijakan restorasi sungai. Dengan pengaplikasian kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir. Selain dari faktor alam ataupun hujan deras yang menjadi penyebab banjir ada juga penyebab dari manusia itu sendiri kemudian kurangnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan air ini menjadi penyebab terjadinya banjir.

#### 3.3.2 Belum Adanya Kebijakan Mengenai Restorasi Sungai

Kendala yang terakhir adalah pengelolaan lingkungan hidup melalu restorasi sungai ditengah kerusakan sungai dan wilayah keairan berupa banjir disebabkan dari pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik serta pembuangan masyarakat membuang sampah seenaknya dan banyak– tanggul yang sudah rusak akibat dari usia. Restorasi sungai yang kurang dan kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan menyebabkan luapan air yang sampai kedaratan sehingga menyebabkan banjir.kami mengusulkan pembuatan tanggul yang baru karena sudah banyak tanggul yang rusak karena usianya yang sudah tua juga, tetapi anggarannya kurang,sehingga Langkah yang diambil untuk mengurangi risiko terjadinya banjir dengan memasang tanda larangan membuang sampah di sekitaran sungai.

# 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi mitigasi bencana banjir pada wilayah daerah aliran sungai wanggu di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam kesiapsiagaan pra bencana banjir di Kota Kendari.

# 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa belum adanya kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai pemerintah maupun komunitas di Kota kendari

# KESIMPULAN

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Kendari belum sepenuhnya maksimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, BPBD melakukan pengamatan lingkungan yang bekerja sama dengan OPD dan instansi terkait. Dalam hal ini BPBD bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan pengamatan lingkungan melalui data cuaca dan iklim, hidrologi, seismik, satelit dan informasi lainnya yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari belum memiliki sistem peringatan dini, sehingga kesulitan untuk memperingatkan masyarakat akan terjadinya banjir. Setelah melakukan pengamatan, BPBD meembuat perumusan strategi rencana jangka Panjang untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan berbagai pihakl seperti Lembaga pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta, dalam pengambilan proses perencanaan dan pengambilan keputusan. BPBD melakukan implementasi strategi yang telah dirumuskan dan melakukan evaluasi serta pengendalian atas strategi yang telah dilakukan agar dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir. BPBD telah melakukan sesosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tetapi belum maksimal diterapkan oleh masyarakat,sehingga tidak munculnya kemandirian masyarakat dalam menangani bencana banjir.

Faktor Pendukung, BPBD melakukan penyuluhan mengenai pentingnya resapan dan biopori kemudian BPBD juga bekerjasama dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan organisasi lingkungan penerapan sumur resapan dan biopori ini BPBD melakukan penyuluhan mengenai pentingnya resapan dan biopori kemudian BPBD juga bekerjasama dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan organisasi lingkungan melakukan Evaluasi kondisi sungai,melakukan kegiatan penanaman vegetasi,peningkatan kapasitas saluran.

Faktor Penghambat yang dialami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari adalah sebagai berikut.

1. Belum adanya kebijakan mengenai sumur resapan
2. Belum adanya kebijakan mengenai restorasi sungai

Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai Pemerintah maupun komunitas di Kota kendari belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi mitigasi bencana banjir pada wilayah daerah aliran sungai wanggu di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

# DAFTAR PUSTAKA

Dwiputra Heri. 2018. *“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”.*

Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 945 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus FPRB Kota Kendari Periode Tahun 2018-2021

Moleong, Lexy J. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazarina Olii, R. S. 2020. *Strategi MitigasiBencana Banjir Berdasarkan PersepsiMasyarakat di Kota Gorontalo*.Makassar: Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.

Ningrum, A. S., & Ginting, K. B. 2020. “*Strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa”*. Jurnal GEOSEE Vol. 1, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi

Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Pembentukan Organiasasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari

Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. tentang Penanggulangan Bencana